

# EFISIENSI ANGGARAN BELANJA BIDANG PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA DI JAWA TIMUR TAHUN 2018

**Betty Silfia Ayu Utami, Maziyah Mazza Basya, Anung Yoga Anindhita.**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya

*e-mail:* betty.silfia@uinsby.ac.id

## ABSTRACT

*This study aims to determine the education budgets efficiency of districts/cities in East Java. This study uses secondary data. Data Envelopment Analysis (DEA) is used to measure the efficiency level with the sample covering all districts/cities in East Java. The results show that the level of efficiency of the education budget is still relatively low. This can be seen from the results of the analysis of 38 districts/cities in East Java, only 5 districts which achieve perfect efficiency, they are Jember, Situbondo, Pasuruan, Mojokerto, Ngawi, and 9 cities namely Kediri, Blitar, Malang, Probolinggo, Pasuruan, Mojokerto, Madiun, Surabaya and Batu. The efficiency is viewed from the output of educational attainment and inputs, which consists of the number of teachers and schools and the realization of the education budget, while the remaining 24 districts have not been efficient in spending on the education sector.*

**Keywords:** *efficient; data envelopment analysis*

## ABSTRAK

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efisiensi anggaran bidang pendidikan Kabupaten/Kota di Jawa Timur Pada tahun 2018. Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data Envelopment Analysis (DEA) digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dengan sampel meliputi semua Kabupaten/Kota di Jawa Timur pada tahun 2018. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat efisiensi anggaran belanja bidang pendidikan di Jawa Timur masih relatif rendah. Rendahnya efisiensi anggaran pendidikan dapat dilihat dari hasil analisis dari 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur, hanya 5 Kabupaten yaitu Jember, Situbondo, Pasuruan, Mojokerto, Ngawi, dan 9 Kota yaitu Kediri, Blitar, Malang, Probolinggo, Pasuruan, Mojokerto, Madiun, Surabaya, Batu yang telah mencapai efisiensi sempurna dengan skor efisiensi sama dengan satu, bila dilihat dari output capaian pendidikan (dalam penelitian ini angka melek huruf, angka putus sekolah, rata-rata lama sekolah) dan input yang digunakan jumlah guru, jumlah sekolah dan realisasi anggaran belanja bidang pendidikan, sedangkan sisanya sebanyak 24 Kabupaten belum efisien dalam pengeluaran anggaran belanja bidang pendidikan.*

**Kata kunci:** *efisiensi; data envelopment analysis*

## PENDAHULUAN

Pembahasan mengenai efisiensi di pemerintahan menjadi topik yang penting. Hal ini dikarenakan dengan anggaran yang terbatas akan memberi dampak yang besar untuk mencapai tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs) (Hsu, 2014). Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah, pemerintah menjalankan berbagai program kegiatan yang ditujukan untuk pemerataan hasil pembangunan dan kesejahteraan masyarakatnya. Sehingga pengeluaran pemerintah diperlukan untuk mendanai program kegiatan yang akan dilaksanakan. Terbatasnya anggaran dan beragamnya program kegiatan yang harus dilaksanakan, mengharuskan pemerintah untuk

mengalokasikan anggaran yang terbatas secara efisien.

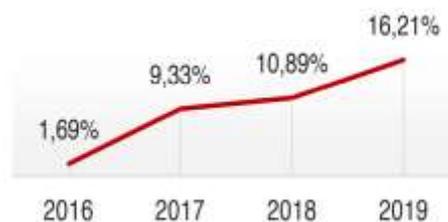
Anggaran memiliki peranan yang penting untuk suatu organisasi dalam mencapai tujuan (Julita, 2011). Anggaran merupakan kunci keberhasilan program-program suatu organisasi, sehingga anggaran belanja yang ditentukan harus dapat diukur efektivitas maupun efisiensinya agar dapat dievaluasi. Anggaran yang direncanakan dengan tepat akan membawa penyerapan yang tepat pula (Halim, 2014). Pengeluaran anggaran belanja pendidikan memiliki kaitan yang erat dengan kesuksesan pemerintah dalam pemerataan hasil pembangunan. Adanya otonomi daerah yaitu pemberian kewenangan oleh pemerintah pusat

kepada pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya sesuai dengan potensi yang dimiliki, salah satunya adalah diimplementasikan dengan desentralisasi fiskal, mengharuskan pemerintah daerah mengelola daerahnya dengan baik. kebijakan tersebut memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengoptimalkan kinerjanya. Menurut Nugroho (2009) menjelaskan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi mutu dan relevansi pendidikan adalah kemampuan pengelolaan anggaran pendidikan yang tepat, karena hal tersebut memungkinkan suatu sistem pendidikan dapat berkembang, salah satu contoh adalah jika gaji guru dan pegawai memadai, buku dan sarana pendidikan memadai, seperti laboratorium, perpustakaan dan alat pelajaran akan mampu memacu penguasaan pengetahuan secara cepat.

Efisiensi pada pengeluaran pemerintah dapat diartikan sebagai suatu kondisi dimana tidak memungkinkan melakukan relokasi sumberdaya yang ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang artinya setiap pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah akan menghasilkan kesejahteraan yang paling optimal. Hal ini menunjukkan sebuah kondisi dimana pengeluaran pemerintah telah mencapai tingkat yang efisien. Pengeluaran pemerintah dikatakan efektif jika anggaran belanja terserap secara optimal. sedangkan anggaran belanja yang efisien adalah jika output yang dihasilkan melebihi target yang telah ditetapkan dari program kegiatan yang dilaksanakan. (Mardiasmo, 2002).

Penelitian terkait efisiensi anggaran sektor publik sudah banyak dilakukan sebelumnya. yaitu penelitian oleh Indriati (2014) yang dilakukan di Kabupaten Sumbawa dengan hasil bahwa rata-rata anggaran bidang pendidikan masih belum efisien. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ahec Sonje et al (2018) dengan hasil yang menunjukkan bahwa pengeluaran sektor publik untuk bidang pendidikan di Kroasia memiliki ketidakefisienan yang tinggi Namun temuan berbeda yang dikemukakan oleh Gavurova et al (2017) menjelaskan bahwa pada negara-negara OECD pengeluaran pemerintah bidang pendidikan memiliki nilai efisiensi yang relatif tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat efisiensi pengalokasian anggaran belanja masing-masing wilayah berbeda. Terdapat daerah yang efisien dalam mengalokasikan anggarannya dan terdapat pula daerah yang belum optimal dalam mengalokasikan anggaran belanjanya. Mulai tahun

2009, Provinsi Jawa Timur mengalokasikan dana yang cukup besar untuk bidang pendidikan dan kesehatan. Pada tahun 2018 anggaran belanja bidang pendidikan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, hal ini bisa dilihat dari trend alokasi anggaran bidang pendidikan yang mengalami peningkatan dari tahun 2016-2019 yang terlihat pada Gambar 1 :



**Gambar 1**  
**Trend Alokasi Anggaran Bidang Pendidikan**

Sumber : Neraca Pendidikan Daerah Jawa Timur 2019

Berdasarkan gambar diatas dapat dijelaskan bahwa trend alokasi anggaran bidang pendidikan di Jawa Timur terus menunjukkan peningkatan, jika di tahun 2016 anggaran sebesar 1,69 persen di tahun 2018 meningkat menjadi 10,89 persen, namun demikian, pada tahun 2018 masih terdapat 0,43 persen masyarakat Jawa Timur dalam golongan usia 7 smpai 12 tahun yang belum atau tidak bersekolah, dimana indikator pendidikan yaitu Angka Melek huruf (AMH) Jawa Timur masih belum mencapai 100 persen, dimana AMH pada tahun 2018 sebesar 91,83 persen. Indikator lainnya yaitu rata-rata lama sekolah di Jawa Timur sebagian besar memiliki rata-rata lama sekolah antara 6 hingga 7 tahun lebih, meskipun beberapa diantaranya memiliki rata-rata lama sekolah dibawah 6 tahun.

Hal tersebut memperlihatkan bahwa rata-raata lama sekolah penduduk di tiap-tiap Kabupaten/Kota jauh di bawah standar yaitu masih setara sekolah dasar atau SD. Untuk penduduk usia 15 tahun yang rata-rata lama sekolahnya dibawah 6 tahun adalah Kabupaten Sampang, Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Bangkalan. 18 Kabupaten/Kota mempunyai rata-rata kama sekolah diatas provinsi dan untuk 20 Kabupaten lainnya masih berada di bawah angka rata-raata provinsi (BPS, 2018). berdasarkan uraian tersbeut maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efisiensi anggaran belanja pada bidang pendidikan Kabupaten/Kota di Jawa Timur pada tahun 2018

dengan menggunakan pendekatan DEA (*Data*

## METODE PENELITIAN

### Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis *Data Envelopment Analysis* (DEA). Metode ini digunakan untuk menganalisis efisiensi teknis anggaran belanja bidang Pendidikan Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Penelitian ini dilakukan pada 38 Kabupaten/Kota provinsi Jawa Timur pada tahun 2018. Data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur dan Neraca Pendidikan Daerah.

### Definisi Dan Pengukuran Variabel

Dalam metode DEA, memerlukan data variabel yang berupa data input dan data output. variabel input dan output yang digunakan dalam penelitian ini adalah (BPS Jawa Timur, 2018) :

#### 1. Variabel Input

##### a. Jumlah Guru

Adalah jumlah guru PNS dan bukan PNS yang tersedia, disajikan dalam jumlah guru PNS dan bukan PNS pada tahun 2018.

##### b. Jumlah Sekolah

Adalah jumlah sekolah meliputi SD, SMP, SMA dan SMK yang disajikan dalam jumlah sekolah SD, SMP, SMA, dan SMK pada tahun 2018.

##### c. Anggaran Belanja Bidang Pendidikan

Adalah anggaran belanja bidang pendidikan yang dialokasikan oleh pemerintah daerah dalam APBD Kab/Kota untuk membiayai kegiatan sektor Pendidikan untuk tiap sekolah. Alokasi ini tidak termasuk dana BOS.

#### 2. Variabel Output

##### a. Angka Melek Huruf

Adalah jumlah proporsi penduduk yang berusia 15 tahun ke atas yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis kalimat sederhana dalam huruf latin, huruf arab, dan huruf lainnya terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas.

##### b. Angka Putus Sekolah

Adalah proporsi penduduk berdasarkan kelompok usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu

*Envelopment Analysis*).

jenjang tertentu terhadap jumlah penduduk yang pernah/sedang bersekolah pada kelompok usia yang bersesuaian. Adapun kelompok usia yang dimaksud adalah kelompok usia 7-12 tahun, 13-15 tahun, 16-18 tahun dan 19-24 tahun.

##### c. Rata-Rata Lama Sekolah

Adalah jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua pendidikan yang telah dijalani, untuk penduduk yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah adalah 6 tahun, Untuk mereka yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah selama 6 tahun, tamat SMP diperhitungkan 9 tahun, untuk tamatan SMU/SMK diperhitungkan selama 12 tahun' tanpa memperhatikan pernah tinggal kelas atau tidak.

### Teknik Analisis

Penelitian ini menggunakan analisis *Data Envelopment Analysis* (DEA) yang mengukur tingkat efisiensi suatu DMU (*Decision Making Unit*) dan membandingkannya dengan DMU yang lainnya. DEA adalah Teknik analisis yang mengakomodasi banyak input dan output dengan perhitungan model linier untuk mendapatkan nilai efisiensi untuk setiap pengamatan (Bogetoft & Otto, 2011). Nilai ini bisa digunakan untuk mengukur efisiensi teknis, skala efisiensi, dan efisiensi alokatif. Model matematis yang umum digunakan dalam DEA adalah sebagai berikut (Cooper et al., 2002) :

#### 1. Model Constan Return to Scale (CRS)

Model CRS Model CRS dapat diartikan jika terdapat penambahan input sebesar x kali, maka output juga akan bertambah sebesar x kali. asumsi lain yang digunakan adalah setiap perusahaan atau Decision making Unit (DMU) beroperasi pada skala optimal. Rumusnya adalah sebagai berikut :

Max  $\Theta$  (Efisiensi DMU Model Max  $\Theta$  (Efisiensi DMU Model CRS)

$$\sum = 1 x_{ij} 'ij \geq \theta i0 n j$$

$$i = 1, 2, \dots, m$$

$$\sum = 1 y_{rj} 'j n j \geq y_i 0$$

$$r = 1, 2, \dots, s$$

$$\sum = 1 j' \geq 0 n j$$

$$j = 1, 2, \dots, n$$

Di mana:

$\Theta$  = efisiensi teknis (CRS) n = jumlah DMU

m = jumlah input s = jumlah output

$x_{ij}$  = jumlah input tipe ke-i dari DMU ke-j

$y_{rj}$  = jumlah output tipe ke-r dari DMU ke-j

Model *Constant Return to Scale* (CRS) menjelaskan jika terdapat penambahan pengeluaran pemerintah yaitu peningkatan belanja bidang pendidikan sebesar 10 persen maka akan meningkatkan angka melek huruf sebesar 10 persen. Hal ini menunjukkan bahwa prosentase peningkatan pada input akan direspon dengan jumlah prosentase yang sama pada outputnya.

## 2. Model Variabel Return To Scale (VRS)

Model VRS dapat diartikan sebagai tambahan input sebesar  $x$  kali tidak akan menyebabkan output meningkat sebesar  $x$  kali, bisa lebih kecil atau lebih besar dari  $x$  kali. peningkatan yang terjadi bisa bersifat *Increasing Return To Scale* (IRS) atau bisa juga bersifat *Decreasing Return To Scale* (DRS). Secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\sum x_j = 1 \quad n, j=1$$

Selanjutnya model BCC dapat ditulis dengan persamaan berikut:

Max (Efisiensi DMU Model VRS)

$$\sum = 1 x_{ij} \quad 'ij \geq x_i0 \quad n, j$$

$$i = 1, 2, \dots, m$$

$$\sum = 1 y_{rj} \quad 'j \geq y_i0 \quad n, j$$

$$r = 1, 2, \dots, j$$

$$\sum = 1 \quad j' \geq 1 \quad n, j$$

(VRS)

$$\sum = 1 \quad 'j \geq 0 \quad n, j$$

$$j = 1, 2, \dots, n$$

$\Theta$  = efisiensi teknis (VRS)  $n$  = jumlah DMU

$m$  = jumlah input  $s$  = jumlah output

$x_{ij}$  = jumlah input ke- $i$  dari DMU

ke- $j$

$y_{rj}$  = jumlah output ke- $r$  dari DMU

ke- $j$

' $j$  = bobot DMU  $j$  untuk DMU yang dihitung

Model *Variabel Return to Scale* (VRS) menjelaskan jika terdapat penambahan pengeluaran pemerintah yaitu peningkatan belanja bidang pendidikan sebesar 10 persen maka respon pada output yaitu angka melek huruf, angka putus sekolah akan berbeda, dimana peningkatannya bisa lebih kecil atau lebih besar 10 persen.

Hasil perhitungan selalu menunjukkan kurang dari atau sama dengan satu. DMU yang nilainya kurang dari 1 maka dikatakan kurang efisien sedangkan DMU yang sama dengan 1 memiliki arti efisien.

## PEMBAHASAN

### Hasil Analisis DEA

Untuk mengukur tingkat efisiensi anggaran belanja pada bidang pendidikan pada penelitian ini, yang digunakan sebagai input adalah jumlah guru, jumlah sekolah, dan anggaran belanja bidang pendidikan, sedangkan outputnya adalah angka melek huruf, angka putus sekolah dan rata-rata lama sekolah yaitu pada tahun 2018, Dan *Decision Making Unit* (DMU) adalah Kabupaten/Kota di Jawa Timur.

Berdasarkan hasil olah data dengan menggunakan aplikasi DEAP, yaitu menggunakan asumsi VRS (*Variabel Return To Scale*) dan berorientasi pada penggunaan input, maka diperoleh hasil, dimana Kabupaten/Kota di Jawa Timur dalam membelanjakan anggarannya di bidang pendidikan dikatakan telah efisien jika memiliki tingkat efisiensi sama dengan 1 dan sebaliknya jika hasilnya kurang dari 1 maka dikatakan anggaran bidang pendidikan belum efisien atau inefisiensi. Hasil dari analisis DEA dengan menggunakan aplikasi DEAP dapat dilihat pada tabel 1 dan tabel 2.

Tabel 1 menunjukkan bahwa hasil analisis efisiensi anggaran belanja pada bidang pendidikan Kabupaten/Kota di Jawa Timur sebagian besar belum efisien. Hal ini terlihat dari score efisiensi 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur yaitu memiliki rata-rata score kurang dari 1. Pada Tahun 2018 Kabupaten yang mencapai nilai efisiensi sama dengan 1 adalah Kabupaten Jember, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Ngawi. Sedangkan Kota yang efisien dalam mengalokasikan anggaran belanja bidang pendidikan adalah, Kota Kediri, Kota Blitar, Kota Malang, Kota Probolinggo, Kota Pasuruan, Kota Mojokerto, Kota Madiun, Kota Surabaya, dan Kota Batu. Sehingga jika kita bandingkan sebanyak 14 Kabupaten/Kota yang telah efisien dalam mengalokasikan anggarannya dan 24 Kabupaten lainnya masih belum efisien. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun anggaran belanja bidang pendidikan meningkat setiap tahunnya, akan tetapi alokasi anggaran untuk pendidikan masih belum efisien.

Berdasarkan hasil analisis efisiensi pada Tabel 1 mengindikasikan bahwa meskipun anggaran belanja di bidang pendidikan terus ditingkatkan namun capaian yang berkaitan dengan bidang pendidikan seperti angka melek huruf (AMH), angka putus sekolah (APS) dan rata-rata lama sekolah belum memperlihatkan perbaikan ataupun peningkatan yang berarti. Pada analisis

DEA ini memperbandingkan rasio input dengan rasio output, yang mana ketidakefisienan dapat terjadi karena output yang dicapai belum optimal dengan input yang digunakan ataupun output yang dicapai belum optimal dengan penggunaan input yang lebih besar dari seharusnya.

**Tabel 1**  
**Nilai Efisiensi Kabupaten di Jawa Timur Tahun 2018**

Kabupaten	Skor Efisiensi (input oriented)
Pacitan	0.974
Ponorogo	0.874
Trenggalek	0.971
Tulungagung	0.923
Blitar	0.891
Kediri	0.799
Malang	0.912
Lumajang	0.961
Jember	1.000
Banyuwangi	0.761
Bondowoso	0.988
Situbondo	1.000
Probolinggo	0.956
Pasuruan	1.000
Sidoarjo	0.682
Mojokerto	1.000
Jombang	0.784
Nganjuk	0.842
Madiun	0.873
Magetan	0.844
Ngawi	1.000
Bojonegoro	0.878
Tuban	0.910
Lamongan	0.805
Gresik	0.740
Bangkalan	0.894
Sampang	0.897
Pamekasan	0.867
Sumenep	0.890

Sumber: Hasil Olah Data Software DEAP, 2021

Berdasarkan Tabel 2 memperlihatkan bahwa tingkat efisiensi yang tinggi dicapai oleh Kabupaten Jember, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Mojokerto,

Kabupaten Ngawi, Kota Kediri, Kota Blitar, Kota Malang, Kota Probolinggo, Kota Pasuruan, Kota Mojokerto, Kota Madiun, Kota Surabaya dan Kota Batu. Pada tahun 2018, menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah yang paling tinggi di Provinsi Jawa Timur adalah Kota Madiun, yaitu 10,40 tahun,, Adapun rata-rata lama sekolah terendah ditunjukkan oleh Kabupaten Sampang sebesar 5,38 tahun (Badan Pusat Statistik, 2018).

**Tabel 2**  
**Nilai Efisiensi Kota di Jawa Timur Tahun 2018**

Kota	Skor Efisiensi (input oriented)
Kediri	1.000
Blitar	1.000
Malang	1.000
Probolinggo	1.000
Pasuruan	1.000
Mojokerto	1.000
Madiun	1.000
Surabaya	1.000
Batu	1.000

Sumber: Hasil olah data Software DEAP, 2021

Kota Surabaya sebagai ibu kota provinsi juga memiliki angka rata-rata lama sekolah yang lumayan tinggi yaitu 9,74 tahun, dikarenakan Kota Surabaya merupakan kota tujuan penduduk dari wilayah lainnya untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Surabaya memiliki berbagai fasilitas pendidikan yang memadai, namun demikian masih banyak wilayah Kabupaten/Kota lainnya yang memiliki angka rata-rata lama sekolah penduduknya rendah. Hal ini menunjukkan bahwa angka rata-rata lama sekolah pada daerah tersebut tidaklah lama dan mempunyai tingkat pendidikan yang masih rendah. rata-rata lama sekolah penduduk di wilayah

Surabaya, Kota Malang dan Kota Madiun adalah wilayah di Jawa Timur yang menunjukkan prosentase yang cukup tinggi untuk tingkat pendidikan yang ditamatkan pada jenjang sekolah menengah ke atas. Kabupaten Sampang, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Probolinggo adalah beberapa daerah yang membutuhkan bantuan dan perhatian khusus dari pemerintah, dikarenakan wilayah tersebut memiliki angka pendidikan paling rendah sehingga diperlukan kebijakan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan.

Angka putus sekolah pada Provinsi Jawa Timur cenderung mengalami kenaikan yaitu pada tahun 2017 angka putus sekolah untuk tingkat sekolah dasar atau SD sebesar 1.808 siswa, SMP sebesar 4.157 siswa, SMA sebesar 3.991 siswa dan SMK sebesar 11.067 siswa. Angka putus sekolah pada tahun 2018 untuk jenjang SD sebesar 4.330 siswa, SMP sebesar 8.316 siswa, SMA sebesar 4.636 siswa, dan SMK sebesar 13.126 siswa (Kemendikbud, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa alokasi anggaran belanja pendidikan masih belum optimal dikarenakan masih banyaknya angka putus sekolah di Jawa Timur. Kabupaten yang paling tinggi angka putus sekolah pada tahun 2018 adalah Kabupaten Sampang yaitu sebesar 1.492 siswa diikuti oleh Kabupaten Bangkalan sebesar 110 siswa. Jika dilihat nilai efisiensi Kabupaten Sampang adalah sebesar 0,897 dan Kabupaten Bangkalan memiliki nilai efisiensi yaitu sebesar 0,894 yang artinya pemerintah tidak atau belum optimal dalam mengalokasikan anggaran belanja bidang pendidikan di Kabupaten Sampang dan Bangkalan.

Sedangkan angka putus sekolah terendah dimiliki oleh Kota Madiun yaitu pada tahun 2018 hanya sebesar 9 siswa saja yang putus sekolah (Kemendikbud, 2019) hal ini juga didukung dengan nilai efisiensinya yaitu sebesar 1,000, Selain Kota Madiun yang memiliki angka putus sekolah terendah, Kota Pasuruan dan Kota Batu juga memiliki angka putus sekolah yang rendah yaitu sebesar 21 siswa, diikuti oleh Kota Batu sebesar 25 siswa, yang juga didukung oleh nilai efisiensi masing-masing sebesar 1,000.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasar pada hasil analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur pada tahun 2018 menunjukkan nilai efisiensi yang berbeda-beda pada tiap-tiap kabupaten/kota dan sebagian besar daerah di Jawa Timur masih belum efisien dalam mengalokasikan anggaran di bidang pendidikan. Terdapat 5 Kabupaten yaitu Kabupaten Jember, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Ngawi, serta 9 Kota yaitu Kota Kediri, Kota Blitar, Kota Malang, Kota Probolinggo, Kota Pasuruan, Kota Mojokerto, Kota Madiun, Kota Surabaya, dan Kota Batu dimana Kota tersebut telah mencapai tingkat efisien. Sedangkan 25 Kabupaten lainnya belum efisien dalam mengalokasikan anggaran pada bidang pendidikan.

## **Keterbatasan dan Rekomendasi Untuk Penelitian Selanjutnya**

Keterbatasan penelitian ini adalah penggunaan variabel penelitian yaitu pemilihan variabel input dan output, yang mana variabel output yang digunakan hanya tiga indikator pendidikan yaitu angka melek huruf, angka putus sekolah dan rata-rata lama sekolah, sedangkan masih banyak indikator pendidikan lain yang tidak dimasukkan seperti APS, APM dan lainnya. Pembahasan hanya berfokus pada tingkat efisiensi alokasi anggaran dan tidak menjelaskan terkait program yang dilakukan agar mencapai tingkat efisiensi yang optimal.

Saran untuk Kabupaten/Kota yang sudah efisien dalam mengalokasikan anggarannya, agar tetap mengatur besarnya belanja dan penerimaan daerahnya supaya tidak terjadi pemborosan. Untuk Kabupaten yang belum efisien diharapkan mengalokasikan anggaran belanjanya sesuai dengan pos yang telah direncanakan, dan membuat program yang menjangkau langsung kepentingan masyarakat terutama akses di bidang pendidikan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ahec Sonje, A., Deskar-Skrbic, M. and Sonje, V. (2018). Efficiency of Public Expenditure on Education: Comparing Croatia With Other Nms', *INTED2018 Proceedings*, 1(85152), pp. 2317–2326.
- Bogetoft, Peter, Otto, L. (2011) *Benchmarking with DEA, SFA, and R*. International Series in Operations Research & Management Science.
- Cooper, W., Seiford, L., & Tone, K. (2002) *Data Envelopment Analysis: A Comprehensive Text with Models, Applications, References and DEA Solver Software*. Kluwer Academic Publishers. New York.
- Halim, A. (2014) *Manajemen keuangan sektor publik: Problematika penerimaan dan pengeluaran pemerintah (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah)*. Jakarta : Salemba Empat.
- Hsu, Y. C. (2014). Efficiency In Government Health Spending: A Super Slacks-Based Model. *Quality and Quantity*, 48(1), pp. 111–126.
- Indriati, N. E. (2014). Analisis Efisiensi Belanja Daerah di Kabupaten Sumbawa (Studi Kasus Bidang Pendidikan dan Kesehatan). *JESP*, 6(2), pp. 192–205.
- Julita. (2011). Analisis Efektifitas dan Efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Pada

- Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara. *Kumpulan Jurnal Dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, 10(2), pp. 1–8.
- Kemendikbud. (2019). *Neraca Pendidikan Daerah*. Jakarta: Kemendikbud Republik Indonesia.
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Andi.
- Nugroho, T. & R. (2009). *Kebijakan Pendidikan*. Yogyakarta : Pustaka Belajar.